

Jokowi: Sudah Tak Zaman Kita Ekspor Bahan Mentah

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sudah bukan saatnya lagi bagi Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Indonesia kini harus melanjutkan proses hilirisasi bahan mentah yang ada di dalam negeri.

"Saya kira sudah tidak zamannya lagi, yang sejak zaman VOC kita selalu mengirim, meng ekspor barang mentah yang nilai tambahnya dinikmati negara lain," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2022 di Bogor, Jawa Barat, yang ditayangkan secara virtual, Sabtu (29/1).

"Dan kita sudah membuktikan dengan hilirisasi, nilai tambah di dalam negeri itu sangat besar," lanjut Presiden. Karena itu, pertambangan minyak, gas, batubara, dan mineral harus melakukan hilirisasi di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Selain itu, hilirisasi bertujuan membuka lapangan kerja sekaligus menghemat devisa negara.

Kepala Negara memberikan contoh, penghentian ekspor nikel sejak 2015 sudah memberikan dampak signifikan dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan. Ekspor besi yang merupakan salah satu hasil olahan nikel men-

capai 20,9 miliar dolar AS pada 2021 atau diperkirakan meningkat Rp 300 triliun dari sebelumnya 1,1 miliar dolar AS pada 2014. "Itu karena peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Oleh sebab itu sudah sering saya sampaikan, tidak hanya nikel saja yang akan kita stop," ujar Jokowi.

"Tahun ini mungkin akan stop lagi bauksit, tahun depan stop tembaga, tahun depannya timah, stop lagi emas. Sehingga tidak ada namanya lagi ekspor bahan mentah," tegasnya.

Pada tahun 2022, Jokowi memprediksi ekspor khusus nikel bisa mencapai 28-30 miliar dolar atau setara dengan Rp 400 triliun. Jokowi menambahkan, hilirisasi juga harus dilakukan di sektor pertanian.

Dia menekankan, petani harus kuat di off farm sehingga inovasi di sektor pertanian dan peternakan harus kuat.

"Tapi jangan berhenti di situ, pupuk, bibit dll. Kelompok tani dan peternak, koperasi tani dan peternak juga harus masuk ke ke hilir," kata Jokowi.

"Sekali lagi agar nilai tambah dinikmati petani karena keuntungan terbesar ada di off farm-nya dan tentu saja bisa membuka lapangan pekerjaan yang semakin banyak," ujarnya. ● han

KSAD: Pembiaran Gerakan Intoleransi di Indonesia Sangat Berbahaya

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan, pembiaran gerakan intoleransi di Indonesia sangat berbahaya.

Dudung menyampaikan hal itu dengan meminjam istilah yang digunakan oleh eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dalam pengantar buku berjudul "Dudung Abdurachman Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi" yang baru diluncurkannya, Sabtu (29/1).

"Saya meminjam istilah Jenderal TNI Purn Prof Dr AM Hendropriyono dalam pengantar buku ini, pembiaran gerakan intoleransi di Indonesia sangat berbahaya, karena sifat dari gerakan intoleransi adalah terorisme," kata Dudung dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad).

Selain itu, Dudung meminjam istilah yang disampaikan Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya yang akrab disapa Habib Luthfi bahwa jangan memberikan peluang

sejengkal pun terhadap kelompok intoleran, pegang teguh empat pilar kebangsaan. Karena itu, Dudung menegaskan, komitmen terhadap merah putih tidak boleh ditawar lagi.

"Indonesia terlahir sebuah keniscayaan akan keberagaman dan perbedaan, dalam perbedaan itulah terletak kekuatan kita sebagai bangsa," katanya.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menyampaikan mengenai isi bukunya. Menurut dia, buku yang ditulis Raylis Sumitra tersebut berkaitan dengan kewaspadaannya terhadap kelompok intoleran yang ingin mencoba merobohkan empat pilar kebangsaan.

"Dalam buku tertulis bahwa kita saat ini mewaspadai kelompok intoleran, yaitu gerakan-gerakan yang mencoba merobohkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, serta UUD 1945 yang merupakan empat pilar kebangsaan yang harus kita jaga, agar Indonesia tidak goyah dan jatuh kepada tangan perusak persatuan dan kesatuan," terang Dudung. ● han

Danjen Kopassus Disematkan Brevet Terjun Bebas Militer

JAKARTA (IM) - Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Brigjen Thevi A Zebua menyematkan brevet terjun bebas militer kepada Komandan Jenderal Pasukan Khusus (Danjen) Kopassus Mayjen Teguh Muji Angkasa.

Penyematan brevet ini digelar di Kopassus Indoor Skydiving Center Pusdiklatkopassus Kopassus Batuajar, Bandung, Jumat (28/1).

Setelah menerima penyematan brevet, Teguh menyampaikan rasa bangga dan rasa hormat kepada seluruh prajurit Kopassus. Hal itu disampaikan khususnya bagi prajurit Pusdiklatkopassus dan

pelatih sekolah terjun bebas militer.

"Terjun bebas militer ini harus dimiliki oleh setiap prajurit kopassus karena Kopassus melakukan tugas-tugas khusus," ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/1).

Teguh menjelaskan, tugas khusus yang diemban prajurit Kopassus misalnya infiltrasi. Dalam pelaksanaannya, kata dia, infiltrasi paling efektif adalah melalui udara.

"Dalam melakukan infiltrasi sarana yang paling efektif melalui udara dalam hal ini terjun bebas militer," jelas jenderal bintang dua itu. ● mei



PEMAKAMAN PRAJURIT TNI GUGUR DI PAPUA

Prajurit TNI memegang foto Prajurit TNI AD Sertu Anumerta Mochamad Rizal Maulana Arifin saat upacara militer pemakaman di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Upacara pemakaman Prajurit TNI AD Sertu Anumerta Rizal Maulana Arifin yang gugur akibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman sekaligus pemberian kenaikan pangkat penghormatan serta santunan kepada keluarga yang ditinggalkan.

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PELUNCURAN BUKU DUDUNG ABDURACHMAN

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kiri) memberikan sambutan saat peluncuran buku bertajuk "Dudung Abdurachman: Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi" di Jakarta, Sabtu (29/1). Buku yang ditulis oleh Raylis Sumitra tersebut bercerita tentang berbagai kebijakan yang diambil Jenderal Dudung Abdurachman saat menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya/Jayakarta.

Zulkifli Hasan sebut Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Indonesia didirikan di atas keberagaman dan rasa persatuan suku, agama, ras, dan antargolongan. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan fitrah yang harus disyukuri bersama.

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan, gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama merupakan sesuatu yang usang. Selain itu, gagasan tersebut juga dinilai tidak menghargai sejarah panjang pendirian negara Indonesia.

"Pikiran untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama atau menawarkan kon-

sep khilafah internasional adalah pikiran usang dan tak menghargai sejarah panjang pendirian bangsa ini," kata Zulkifli dalam pidato kebudayaan yang disampaikan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Sabtu (29/1).

Zulkifli menegaskan, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan agama sama sekali tak bertentangan. Karena itu, lanjut Zulkifli, polarisasi politik dan agama tidak boleh mengarah

pada upaya mengganti format bernegara di Indonesia.

"Konsep bernegara kita sudah final, Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberagaman. Bhineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita sepakat menjadi tunggal ika, yang satu yaitu Indonesia," ujarnya.

Zulkifli mengemukakan, Indonesia didirikan di atas keberagaman dan rasa persatuan suku, agama, ras, dan antargolongan. Dia mengatakan, keberagaman bangsa Indonesia merupakan fitrah yang harus disyukuri bersama.

"Tidak ada pilihan lain negara dengan keberagaman yang sangat kompleks seperti Indonesia, persatuan harus dirajut," ucapnya.

Dalam kesempatan itu,

Zulkifli menyampaikan pentingnya gagasan Islam tengah atau Islam moderat bagi kehidupan bangsa. Menurut dia, Islam tengah bukan sebuah konsep baru di Tanah Air. Namun, gagasan Islam tengah harus diperkuat kembali.

Dia mengatakan, Islam tengah harus menjadi fondasi dalam tatanan kehidupan sosial serta menjadi jalan politik Indonesia di masa mendatang.

"Melihat situasi Indonesia saat ini, saya melihat spirit Islam tengah harus kita perkuat kembali," katanya.

Zulkifli mengemukakan, Islam tengah tidak hanya membawa visi ketuhanan, tapi juga visi kemanusiaan. Ia mengatakan, Islam moderat merupakan sebuah konsep keislaman dan jalan kebangsaan yang perlu jadi panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Mendorong gagasan Islam tengah sebagai jalan kebangsaan merupakan tanggung jawab kolektif kita bersama.

Sudah saannya kita bergerak ke tengah, tidak ekstrem kiri atau kanan," ujarnya. ● han

Dinilai Masih Banyak Kendala, DPR Minta Pemerintah Agar Jeli soal Digitalisasi TV

JAKARTA (IM) - Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengamandatkan bahwa digitalisasi televisi analog switched off (ASO) akan dimulai bertahap mulai 2 November 2022 di sejumlah daerah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan agar pemerintah dalam pelaksanaannya tidak saklek dan harus melihat kondisi di daerah, yang mana bisa muncul masalah-masalah teknis tertentu yang harus segera dilakukan perbaikan.

"Saya kan kemarin nongong ke Balai Monitoring itu jangan terlalu saklek pada saat hari H nya, kalau ternyata dilihat secara teknis belum terlalu siap semuanya ya lakukan perbaikan secepatnya agar November 2022 bisa switched off, intinya switched off tetap," kata Kharis saat dihubungi, Minggu (30/1).

Dikatakan Kharis, pemerintah harus jeli melihat, misalnya masyarakat sebagai penerima siaran digital sudah siap, tapi ternyata secara teknis terjadi masalah pada siaran digitalnya. Sementara, kebi-

jakannya tetap harus switched off untuk siaran analog.

"Ya tetap lihat, kalau masalahnya ternyata bukan di penerimaan, penerimaannya udah siap ternyata secara teknis enggak tahu apa, tapi tetap harus switched off," ujarnya.

Selanjutnya, kata Kharis, jika ada masalah lain terkait tidak tersedianya set top box (STB) di pasaran di daerah tertentu.

Apalagi, yang disediakan gratis untuk masyarakat miskin hanya 6,7 juta, padahal masyarakat Indonesia yang punya tv ada berapa ratus juta.

Dia juga mempertanyakan, apakah masyarakat miskin ini tahu kalau mereka akan mendapatkan STB gratis, apakah masyarakat yang tidak masuk kategori miskin mampu membelinya, dan apakah STB eresia di pasaran.

Oleh karena itu, Kharis meminta agar sosialisasi kepada masyarakat harus tetap dimaksimalkan dan ketika muncul masalah harus disikapi dengan bijak.

"Jadi problem-problem seperti itu kita harus bijak dalam menyikapi," pinta legislator Dapil Jawa Tengah V ini. ● han

Gus Yahya Canangkan Pembangunan Kantor Baru PBNU di IKN Nusantara

JAKARTA (IM) - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) resmi mencanangkan pembangunan kantor baru PBNU di Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Selain itu, PBNU juga akan membangun rumah sakit, pesantren, dan perguruan tinggi di wilayah tersebut.

"PBNU mendahului mohon izin untuk ikut menempati Ibu Kota Negara Nusantara," kata Gus Yahya di sela-sela pencahangan kantor baru PBNU di IKN Penajam Paser Utara, Minggu (30/1).

Gus Yahya mengatakan, untuk pembangunan kantor baru PBNU telah ada pembicaraan baik dengan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, sudah ada pembicaraan dari kemarin. Dan Pak Bupati (Penajam Paser Utara) siap memfasilitasi. Supaya begitu resmi kantor Ibu Kota Nusantara (ditempati) di situ segera ada gedung baru kantor PBNU," kata Gus Yahya.

Nama Nusantara sebagai IKN, kata Gus Yahya, sebenarnya bisa dikaitkan dengan dunia santri.

"Nusantara itu NU, santri, pemerintah dan rakyat," kata Gus Yahya.

Menurut Gus Yahya, ketika mulai ada gagasan untuk membangun Ibu Kota baru, saat itu banyak daerah mengajukan diri menjadi Ibu Kota baru.

"Saya pikir malah masyarakat di sini tidak kepikiran. Jadi jadi Ibu Kota malah tidak kepikiran. Kalau dulu orang daerah sekarang jadi Ibu Kota dan orang Jakarta nanti akan jadi orang daerah," kata Gus Yahya disambut dengan tawa hadirin.

Selain mencanangkan kantor baru, Gus Yahya didampingi Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipu), pengurus inti PBNU, Bupati Penajam Paser Utara serta beberapa tokoh lintas menuju titik nol pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di titik nol Ibu Kota, yang masih berupa hutan, Gus Yahya lantas memimpin doa bersama dan diamin para tokoh yang hadir di lokasi kegiatan. ● han



PIDATO KEBUDAYAAN ZULKIFLI HASAN

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) bersama Ketua Majelis Penasihat Partai Hatta Rajasa (kedua kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berjalan menuju acara 'Zulhas Award dan Pidato Kebudayaan bertajuk Indonesia Butuh Islam Tengah' di Auditorium Utama Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (29/1).

Pemilu Digelar 14 Februari 2024 Karena Maret-April Masuk Ramadhan

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menjelaskan, pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 diputuskan karena sejumlah alasan. Di antaranya untuk menghormati perayaan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran yang jatuh pada Maret dan April 2024.

"Bulan Maret dan April itu Ramadhan, Idul Fitri, sehingga tidak mungkin rasanya kita lakukan Pemilu dan Pilkada dengan tahapan itu ketat di bulan Maret dan April," kata Ilham dalam diskusi Total Politik bertajuk "Pemilu 2024 Masih Berlanjut, Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Masih Berlanjut?," Minggu (30/1).

Menurutnya, jadwal pemungutan suara yang rencananya digelar pada 14 Februari 2024 itu berbeda dengan kebiasaan dalam Pemilu sebelumnya. Ilham menuturkan, biasanya, Pemilu selalu dilaksanakan pada bulan April.

Namun karena tahun 2024, periode tersebut berada dalam bulan puasa dan hari Lebaran, pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu memilih untuk memajukan jadwal pemungutan suara. Di sisi lain, mempercepat jadwal pemun-

gutan suara dilakukan KPU untuk mengantisipasi adanya waktu yang berisiran antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.

"Karena ini adalah pemilu yang pertama kali dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada di tahun yang sama. Walaupun pemilunya 14 Februari, kemudian Pilkadaanya November, tapi itu sangat berisiran," jelasnya.

Alasan kedua, KPU memilih Februari karena mengingat bahwa biasanya, dalam Pemilu selalu ada tahap di mana peserta mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilu. Ilham menjelaskan, permohonan itu kerap dikenal sebagai perselisihan hasil Pemilu di mana membutuhkan alokasi waktu yang cukup bagi penyelenggara Pemilu untuk dapat menganyainya.

"Dalam perhitungan kami, kemungkinan besar, kalau kemudian nanti pendaftaran pilkada pada Agustus, jika ini dikabulkan MK, tidak bisa mencalonkan calonnya. Kemudian, secara partai tidak bisa melakukan konsolidasi politik dalam pencalonan kepala daerah. Itu yang menjadi perhitungan kami," tutur dia.

Menurut Ilham, meski KPU pada dasarnya berwenang menentukan dan memutuskan jadwal Pemilu, tetapi sejumlah pertimbangan pihak lain tetap diperlukan sebagai masukan.

"Karena, oh ini tentu juga Pemilu tak hanya punya KPU, tapi punya keterlibatan DPR dan pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu menyepakati jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan dalam rapat kerja Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/1) lalu.

"Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat membacakan simpulan rapat.

Sembilan fraksi di DPR secara bulat menyepakati penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari. ● han